

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN PEMANFAATAN PEKARANGAN SEBAGAI SUMBER PANGAN DAN GIZI DALAM MENGATASI MASALAH STUNTING DI DESA HAUTEAS BARAT KECAMATAN BIBOKI UTARA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Fransiskus Roland Muti<sup>(1)</sup>, Agustinus L. Tiza, S.Sos.,M.AP<sup>(2)</sup>, Stefanus Bekun, S.Sos.,M.AP<sup>(3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Timor

Email: [mutiroland93@gmail.com](mailto:mutiroland93@gmail.com) [aguslongatiza@gmail.com](mailto:aguslongatiza@gmail.com) [stefanusbekun@gmail.com](mailto:stefanusbekun@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pemanfaatan pekarangan yang kurang optimal sebagai salah satu pemicu rendahnya ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga yang berdampak pada stunting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan kebijakan Gerakan Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Pangan Dan Gizi dalam mengatasi masalah stunting di Desa Hauteas Barat Kecamatan Biboki Utara Kabupaten TTU. Penelitian ini menggunakan Penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penerapan kebijakan yang ideal kepada masyarakat melalui sosialisasi, arahan dan pelatihan serta motivasi belum dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk dapat mengoptimalkan potensi lahan pekarangan dengan menanam tanaman-tanaman yang mengandung gizi. Walaupun pemerintah telah menargetkan kelompok sasaran yang tepat yaitu semua masyarakat di Desa Hauteas Barat melalui kebijakan pemanfaatan pekarangan namun belum ada kesadaran masyarakat untuk dapat memanfaatkan pekarangan rumah sekitar dengan baik. Dengan struktur organisasi yang baik dan standar unit kerja yang maksimal serta tupoksi yang jelas pemerintah Desa berusaha untuk mengurangi Stunting melalui kebijakan gerakan pemanfaatan pekarangan. Namun masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya gerakan pemanfaatan pekarangan, sehingga mengharuskan pemerintah untuk terus menerus memberikan arahan dan binaan kepada masyarakat terkait pemanfaatan pekarangan sesuai dengan aturan yang ada.

**Kata Kunci : Implementasi; Kebijakan Pemanfaatan Pekarangan**

---

**PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 pasal 1 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan

pembuatan makanan atau minuman. Dalam pasal 60 telah diamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumen pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal untuk mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Tindak lanjut dari Undang-Undang Pangan tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi dalam pasal 26 disebutkan bahwa upaya penganekaragaman pangan salah

satunya dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti diamanatkan dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat, dalam undang-undang tersebut juga disebutkan Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka. Kecukupan pangan yang baik mendukung tercapainya status gizi yang baik sehingga akan menghasilkan generasi muda yang berkualitas.

Disamping itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan dilakukan diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal melalui peningkatan teknologi pengolahan produk pangan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan dengan gizi seimbang. Peraturan Pemerintah tentang ketahanan pangan juga menggarisbawahi untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumberdaya manusia yang meliputi pendidikan dan pelatihan dibidang pangan, penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan.

Masalah pangan dan gizi merupakan masalah pokok yang mendasari seluruh kehidupan dan pembangunan bangsa. Ketahanan pangan dan gizi bukan hanya mengenai jumlah bahan makanan yang tersedia, tapi juga kandungan gizi di dalamnya. Memperhatikan ketahanan pangan artinya mengubah pola pikir dalam melihat definisi hidup yang sehat dan seimbang. Hal ini senada dengan pendapat banyak ahli bahwa nutrisi perlu diposisikan dalam sisi demand, dan ketahanan pangan dalam sisi supply, agar kekurangan gizi dapat diatasi secara komprehensif.

Stunting merupakan keadaan kekurangan gizi akut yang menjadi salah satu penyebab kematian pada balita di dunia dan dapat berdampak pada kualitas kehidupan yang rendah di masa depan. Keadaan stunting erat kaitannya dengan kerawanan pangan keluarga dan penyakit infeksi seperti diare yang dialami balita. Stunting merupakan salah satu keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi masa lalu sehingga termasuk dalam masalah gizi yang bersifat kronis. Stunting merupakan ukuran status gizi balita dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur, dan jenis kelamin balita. Kebiasaan tidak mengukur tinggi atau panjang badan balita di masyarakat menyebabkan kejadian stunting sulit disadari. Hal tersebut membuat stunting menjadi salah satu fokus pada target perbaikan gizi di dunia sampai tahun 2025.

Penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Sejalan dengan inisiatif Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan

Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 HPK. Selain itu, indikator dan target penurunan stunting telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017-2019.

Masalah gizi di Indonesia dipengaruhi banyak faktor, diantaranya kemiskinan, kesehatan, pangan, pendidikan, air bersih, keluarga berencana, sanitasi dan faktor lainnya. Oleh karena itu permasalahan perbaikan gizi masyarakat merupakan upaya dari berbagai sektor yang membutuhkan sinergi dan harus terkoordinasi.

Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam upaya mencegah terjadinya penurunan angka stunting. Bukan hanya berbicara terkait dengan kesehatan dari para stunting tapi bagaimana pengolahan pangan yang baik dan benar dalam asupan gizi. Dalam upaya meningkatkan nilai pangan dimulai dengan dalam rumah tangga sendiri, misalnya dalam pengelolaan pekarangan rumah yang ada untuk di jadikan sebagai lahan pertanian misalnya membudidayakan sayur-sayuran yang baik untuk kesehatan anak maupun orang tua sendiri. Dalam hal ini perlu adanya peran serta pemerintah dalam menyikapi hal tersebut. Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan memiliki peran penting yaitu dengan melakukan sosialisasi dan juga penyuluhan- penyuluhan yang berkaitan dengan cara pencegahan stunting salah

satu caranya dengan membudidayakan sayuran di pekarangan rumah.

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi NTT yang memiliki hasil komoditi yang baik berupa padi-padian, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan, serta hewani. Namun pada kenyataanya Kabupaten TTU merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat stunting cukup tinggi, yaitu 51,26% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 yaitu 44,4%. Berdasarkan data stunting di tingkat kecamatan disimpulkan bahwa Kecamatan Biboki Utara merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten TTU dengan penyumbang prevalensi stunting yang cukup banyak yaitu 68.89% pada tahun 2018 dan 49.2% pada tahun 2019.

Desa Hauteas Barat merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Biboki Utara dengan prevalensi angka stunting tertinggi yaitu 67,61% jika dibandingkan dengan desa - desa lainnya yang berada di wilayah Kecamatan Biboki Utara. Masalah ketahanan pangan tersebut akibat adanya anomali iklim dimana kekeringan yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan lahan pertanian khususnya sawah tadah hujan gagal tanam dan kehilangan hasil panen, Komoditi lain pun seperti jagung, dan kacang - kacangan mengalami hal yang sama. Hal tersebut mengakibatkan rumah tangga petani mengalami kekurangan bahan pangan yang berdampak pada asupan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan bayi balita mengalami kekurangan gizi kronis yang berdampak pada stunting. Kondisi lainya yaitu potensi lahan pekarangan yang cukup luas namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat disebabkan karena

rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.

Dalam hal ini pemerintah Desa Hauteas Barat memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan gerakan pemanfaatan pekarangan dengan baik kepada masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan potensi lahan pekarangan yang ada dengan baik. Namun pada kenyataannya masyarakat masih saja tidak mengindahkan anjuran dari pemerintah. Pada umumnya masyarakat Desa Hauteas Barat memiliki banyak komoditi yang dapat dijadikan sumber pangan yang baik untuk kesehatan gizi, tetapi masih saja ada balita yang mengalami stunting disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat yang belum optimal dalam memanfaatkan potensi yang ada dengan baik sehingga menjadi salah satu pemicu rendahnya ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga yang berdampak pada stunting.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan fokusnya meliputi : kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, implementing organization, Enviromental factor.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini tehnik yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumen dengan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman melalui tahap pengumpulan data, penyajian data, reduksidata dan kesimpulan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Kebijakan Yang di Idealkan ( *Idealised Policy* )**

Kebijakan merupakan suatu program yang ditetapkan untuk dilaksanakan dengan tujuan tertentu. Dalam program itu, pemerintah mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, David Easton dalam Said Zainal Abidin(2014: 5) menyebutkan kebijakan publik sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mengandung konotasi akan wewenang pemerintah yang meliputi semua dimensi hidup warga negaranya dan tidak ada organisasi manapun yang memiliki kewenangan mengatur selain pemerintah. Kewenangan untuk mengatur dari pemerintah selalu memiliki tujuan. Definisi ini diperkuat oleh definisi Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Riant Nugroho (2012 : 119) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu dan praktek-praktek tertentu (*a projected program of goals values and practices*) definisi ini menyiratkan pengertian bahwa kebijakan publik adalah proyeksi dari program-program yang ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan tertentu untuk dilaksanakan atau diimplementasikannya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat di simpulkan bahwa kebijakan yang di idealkan oleh pemerintah Desa dengan memberikan arahan, motivasi dan pembinaan atau pelatihan - pelatihan kepada masyarakat belum seutuhnya tercapai. Hal ini di buktikan dengan kurangnya kesadaran dari masyarakat yang belum mengoptimalkan potensi lahan pekarangan dengan baik dan curah hujan yang tidak stabil belakangan ini, padahal masyarakat pada umumnya memiliki

potensi lahan pekarangan yang cukup luas. Begitu banyak kebijakan yang di berikan oleh pemerintah Desa terhadap masyarakat namun mereka belum mengindahkan hal tersebut, sehingga kebijakan yang terakhir di lakukan adalah dengan terus menerus memberikan peringatan-peringatan tentang pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi.

Berdasarkan hasil peelitian dan pembahasan teori di atas, dapat di simpulkan bahwa kebijakan yang di idealkan belum sepenuhnya menyadarkan masyarakat untuk dapat mengoptimalkan atau memanfaatkan potensi lahan pekarangan yang ada dengan baik.

## **2. Kelompok Sasaran( Target Groups)**

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa kelompok sasaran (target groups) sudah tepat. Namun kebijakan yang di tujukan kepada kelompok sasaran dalam hal ini masyarakat belum sepenuhnya di katakan baik dan berhasil. Hal Ini di karenakan kelompok sasaran yang di maksud tidak mengindahkan kebijakan yang telah di berikan oleh pemerintah.

Winarno, mengatakan bahwa kelompok sasaran merupakan objek yang di kenakan suatu kebijakan. Kelompok sasaran menjadi penentu apakah kebijakan yang telah di buat akan berhasil atau tidak, hal ini di karenakan maksud dari suatu kebijakan yang di buat tersebut yaitu untuk merespon atau menanggulangi permasalahan yang ada dalam kelompok sasaran tersebut.

Kebijakan ini di katakan belum sepenuhnya berhasil karena di lihat dari kelompok sasaran yang belum mengindahkan kebijakan tersebut. Tidak adanya respon baik dari masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang di berikan oleh pemerintah Desa.

Maka berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat di simpulkan bahwa kelompok sasaran dalam hal ini masyarakat, belum sepenuhnya menaati kebijakan yang di

berikan pemerintah terkait rendahnya kesadaran dan keterbatasan ekonomi dengan tingkat kesibukan yang begitu banyak dimana masyarakat lebih cenderung memprioritaskan kebutuhan ekonomi rumah tangga sehingga masyarakat tidak mengindahkan kebijakan yang ada tanpa disadari akan berdampak pada perkembangan kehidupannya.

## **3. Implementing Organization**

Berdasarkan penelitian di atas, bahwa adanya pembagian tugas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Hauteas Barat di Desa Hauteas Barat dalam memantau masyarakat di Wilayah Desa Hauteas Barat pada umumnya lebih khususnya masyarakat terdampak stunting.

Chester I. Bernard mengatakan bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang di lakukan oleh dua orang atau lebih. Dengan adanya pembagian tugas yang baik pemerintah Desa di harapkan dapat membantu masyarakat dalam mengelola lahan pekarangan. Namun rupanya meskipun dengan struktur organisasi yang baik, masyarakat masih saja tidak menghiraukan himbauan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan teori di atas, dapat di simpulkan bahwa struktur organisasi pada kantor Desa Hauteas barat sudah tertata dengan baik dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa. Namun masyarakat masih saja acuh dan tidak menghiraukannya.

## **4. Environmental Factors**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat kita ketahui bahwa faktor lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Keberadaan sebagian masyarakat yang acuh terhadap kebijakan yang ada akan menarik masyarakat yang lain untuk sama-sama tidak mengindahkan anjuran pemerintah.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi.

Sehingga pemerintah Desa selalu memberikan mereka arahan, motivasi, dan pembinaan terkait pemanfaatan lahan pekarangan yang baik dan benar.

Munadjat Danusaputro mengatakan bahwa lingkungan merupakan seluruh benda dan daya serta keadaan termasuk yang ada di dalamnya manusia dan segala tingkah perbuatannya yang berada dalam ruang dimana manusia memang berada dan mempengaruhi suatu kelangsungan hidup serta pada kesejahteraan manusia dan jasad hidup yang lainnya. Hal ini yang menunjukkan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi untuk tidak mengindahkan anjuran pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa *Environmental Factor* (faktor lingkungan) merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dimana sebagian masyarakat sangat terbiasa dengan sosial budaya yang ada yang mengharuskan masyarakat untuk tidak mengkonsumsi tanaman yang mengandung gizi salah satunya adalah pohon kelor disebabkan karena faktor pemali atau pantang. Hal tersebut membuat masyarakat belum dapat melaksanakan program pemanfaatan pekarangan dengan sepenuhnya. Selain itu dengan tidak mengindahkan kebijakan dari pemerintah akan memberi dampak terhadap perkembangan kehidupan masyarakat di mana akan mengalami kerawanan pangan dan keterbatasan asupan gizi.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Gerakan Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Pangan Dan Gizi Dalam Mengatasi Masalah Stunting Di Desa Hauteas Barat Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara, dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan yang di idealkan belum sepenuhnya menyadarkan masyarakat

untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi.

2. Kelompok sasaran dalam hal ini masyarakat, belum sepenuhnya menaati kebijakan yang di berikan pemerintah.
3. Struktur organisasi pada kantor Desa Hauteas Barat sudah tertata dengan baik berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.
4. *Environmental Factor* (faktor lingkungan) merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi masyarakat. Faktor yang dimaksud adalah faktor sosial, ekonomi dan budaya.

#### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan-kesimpulan di atas maka disarankan :

1. Perlu dilakukan sosialisasi, arahan, binaan dan motivasi terus menerus secara terstruktur dan terperinci Oleh pemerintah daerah Kabupaten TTU.
2. Masyarakat Desa Hauteas Barat harus memanfaatkan potensi lahan pekarangan yang ada dengan baik dan benar sesuai dengan anjuran dari pihak pemerintah.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Tim penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU
2. Pemerintah Desa Hauteas Barat
3. Petugas Kesehatan (Kader) di Desa Hauteas Barat

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- 1) Arifin Tahir, 2011, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT Pustaka Indonesia Press.
- 2) Anderson, James E. 1978. *Public Policy Making*. Chicago : Holt, Rinehart and Winston.
- 3) Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*.

- 4) Dunn, W . N. 1981. *Public Policy Analysis : An Introduction*. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc ., Englewood Cliffs.
- 5) Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Keputusan Menteri Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2015.
- 6) Edwards III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- 7) Edwar N Gladen dalam Riant Nugroho, 2012, *Public Policy*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo(Kompas Gramedia).
- 8) Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press..
- 9) H. Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung, AIPI Bandung PUSLIT KP2W LEMLIT UNPAD.
- 10) Kementerian PPN/Bappenas, 2018, *Pedoman pelaksanaan Intervensi penurunan Stunting terintegrasi di Kabupaten/Kota*, Jakarta : Bappenas
- 11) Lexy J. Moleong 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- 12) Nabusa Debora Christin, 2012, *Riwayat pola asuh, pola makan, asupan zat gizi berhubungan dengan Stunting pada anak 24–59 bulan di Biboki Utara-Timor Tengah Utara*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- 13) Moleong Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- 14) Sugiyono, 2010.*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* R D. Alfabeta, Bandung.
- 15) Said Sainal Abidin 2012. *Kebijakan Publik Ed. 2*. Jakarta : Salemba Humanika.
- 16) Samuel P Huntington 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven : Yale University.
- 17) Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik (teori dan proses)*. Jakarta: media Pressindo